Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mangir Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Mohammad Tri Gandhi Bahtiar[1], Oktavima Wisdaningrum[2], Bambang Wicaksono[3*]

tri.gandhi03@gmail.com; oktavima@untag-Banyuwangi.ac.id; *bambang.wicaksono@untag-banyuwangi.ac.id

Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Abstract: *This research aims to analyze the influence of apparatus competency, clarity of budget targets, transparency and community participation on accountability in village fund management (case study in Mangir Village, Rogojampi District, Banyuwangi Regency). The sampling technique used in this research uses non-probability sampling with a sampling type, namely saturated sampling with a sample size of 33 respondents namely all the apparatus, community institutions and community elements in Dersa Mangir, Rogojampi District, Kaburpatern Banyurwangi.. The method in this research uses quantitative methods by distributing questionnaires. Data analysis uses multiple linear regression. The research results show that apparatus competency has a positive effect on village fund management accountability. Clarity of Budget Targets, Transparency and Community Participation do not affect the Accountability of Village Fund Management. It is hoped that the results of this research can be input for village officials and the community in running and monitoring government, especially village heads in making policies so that they can determine the optimal proportion of accountability for managing village funds in order to improve development and community welfare.*

Keywords *: Apparatus Competence, Clarity of Budget Targets, Transparency, Community Participation and Accountability for Village Fund Management.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* dengan jenis *sampling* yaitu *sampling* jenuh dengan jumlah sampel 33 responden yakni seluruh aparatur, kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuisioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi apartur desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintahan, terutama kepala desa dalam membuat kebijakan sehingga dapat menentukan

proporsi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang optimal demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

PENDAHULUAN

Kompetensi yang dimiliki aparatur dapat mendorong pemahaman tentang tata cara pengelolaan dana desa dengan baik dan benar. Tidak memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan benar akan berdampak kekeliruan penyusunan laporan keuangan yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga mengakibatkan kekeliruan informasi yang diterima masyarakat dan berdampak pada pengambilan keputusan yang diambil selanjutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Alauddin (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indraswari dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi dibutuhkan untuk pertanggung jawaban atas segala aktivitas Pengelolaan dana desa, seperti memberikan, menyajikan, dan melaporkan secara transparan. transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yangberlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Fajri et al., 2021). Penelitian yang dilakukan Fajri et al. (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di lain pihak penelitian yang dilakukan Aprilya dan Fitria Astri (2020) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mengurangi munculnya kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tahap pembangunan sampai dengan pengawasan maupun pelestarian lingkungan adalah suatu hak yang dimiliki masyarakat. Menurut Alauddin (2020) semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan

dan pembangunan juga semakin baik. Penelitian yang dilakukan Alauddin (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan Indraswari dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang ada pada sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini. Untuk mencapai proses tersebut upaya pemerintah salah satunya adalah memberikan dana desa yang di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyakarakat desa menurut Sugiarti & Yudianto, (Alauddin, 2020). Pemerintahan daerah diberikan kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan-urusan didalam pemerintahannya untuk meminimalisir adanya campur tangan pemerintahan pusat. Adanya desentralisasi merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan kesejahteraan dan tumbuh kembang ekonomi di setiap lapisan masyarakat.

Pelimpahan kekuasaan ini didukung melalui diterbitkannya regulasi-regulasi untuk mengatur tata cara mengelola pemerintahan desa. Diharapkan kesenjangan pembangunan akan menurun dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dengan adanya perlimpahan kekuasaan tersebut. Penerbitan aturan tentang desa di dalam UU Nomor 6 tahun 2014 yang mengandung beberapa peraturan mengenai desa, diantaranya ada kebijakan mengenai alokasi anggaran desa yang sangat besar dan disalurkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia.

Kepala Desa Katulisan Kabupaten Serang, Erpin Kuswati melakukan penyelewengan penggunaan dana desa tahun 2020-2021 yang menurut hasil penyidikan Inspektorat Kabupaten Serang, telah merugikan keuangan negara dengan jumlah nominal Rp 900 juta. Dana korupsi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli baju, *skincare*, dan lain-lain. Maka dari fenomena tersebut, desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi agar lebih berhati hati. Masyarakat diharapkan untuk terus ikut terlibat dari pengawasan penggunaan hingga realisasi dana desa tersebut.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Mangir Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Desa	Add (Pembulatan Dalam Rupiah)	Nomor Sk Bupati Banyuwangi
2022	Mangir	779.386.000	118/15/KEP/429.011/2022
2023	Mangir	835.627.000	188/992/KEP/429.011/2022

Sumber: SK Bupati Banyuwangi ADD 2022-2023

Data diatas menunjukkan bahwa alokasi dana desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang digulirkan semakin bertambah, untuk mendukung kewajiban serta fungsi desa dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa di seluruh aspek. Faktor yang paling mempengaruhi kenaikan pagu anggaran yaitu naiknya (APBN) dari pemerintah pusat. Melihat nominal yang digulirkan cukup besar, tentu juga berdampak negatif pula bagi pemerintah desa karena masalah perihal keuangan termasuk hal yang sangat rentan jika tidak diatur dengan baik seperti adanya penyalahgunaan dana, penyelewengan dana, dan juga kesalahan dalam proses administrasi. Apalagi melihat pergantian struktur pemerintahan yang terjadi di Desa Mangir pada tahun 2022. Pergantian struktur pemerintahan tentunya juga mengakibatkan kebijakan-kebijakan didalamnya juga ikut diperbaharui.

Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa agar pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipasif serta tertib dan disiplin dalam anggaran. pengelolaan dana desa harus diimbangi dengan aspek tata pemerintahan yang baik *(good governance)* yang salah satu azasnya yaitu akuntabilitas (Alauddin, 2020). Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (Alauddin, 2020). Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya.

Anggaran merupakan rancangan keuangan yang disusun secara sistematis untuk pembiayaan kedepan dalam jangka waktu tertentu. Kejelasan sasaran anggaran harus diperhatikan dalam suatu penganggaran. Kejelasaan sasaran anggaran berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran, sehingga dengan adanya sasaran anggaran maka akan mempermudah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh aparat desa (Dwipayani dan Hutnaleontina 2022). Penelitian yang dilakukan Yuliastuti dan Riharjo (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebaliknya menurut Pebriyanto dan Sumadi (2021) kejelasan sasaran anggaran tidak mendapatkan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran peneliti sebelumnya adalah kota dari masing-masing peneliti. Hasil penelitian terdahulu juga masih terdapat perbedaan dan ketidakkonsistenan yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan variabel-variabel independen seperti kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dilakukan penelitian terkait beberapa variable tersebut di atas pada pengelolaan dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI

Teori Agensi *(Agency Theory*)

Agency theory (teori keagenan) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan suatu teori yang mengemukakan bahwa pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Adanya tujuan yang berbeda antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan masalah keagenan. Banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadinya permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurut Nurkhasanah (Alauddin, 2020).

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat desa) (Aprilya dan Fitria, 2020). Keterkaitan dengan adanya teori agensi dalam penelitian

ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kepala Desa dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara desa diharapkan mampu menegelola keuangan dengan baik serta menyapaikan laporan pertanggung jawaban dengan akuntabel.

Menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana desa dan mempertanggungjawabkan kinerjanya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pengelola dana desa. *Information asymmetry* akan berkurang dengan peningkatan akuntabilitas tersebut. Permasalahan tentang pengelolaan dana desa bisa berkurang dengan semakin kecilnya *information asymmetry.*

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Alauddin (2020) Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (*account-tability*) yang berarti keadaan yang dapat di pertanggungjawabankan, Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat di pertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu sebuah pertanggungjawaban dari pengelola dana desa kepada masyarakat atas kinerjanya, sejauh mana merealisasikan kebijakan yang dijalankan dalam upaya memenuhi harapan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kinerja aparatur pemerintah desa di mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun

kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang-undangan (Fajri et al., 2021).

Kompetensi Aparatur

Menurut Hevesi (Aprilya dan Fitria, 2020) kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Penilaian kompetensi seseorang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, serta keterampilan yang dimilikinya. Keberhasilan suatu pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi dilandasi dengan seberapa tinggi kualitas sumber daya manusia yang menjalankan. Aparatur desa harus mempunyai hal-hal yang disebutkan diatas supaya memiliki sumber daya yang memadai dalam mengelola dana desa.

Aparatur yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel (Fajri et al., 2021). Apabila tidak memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan benar akan berdampak kekeliruan penyusunan laporan keuangan yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Semakin berkompeten aparatur pengelolan dana desa maka akan semakin mudah pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuaan pemerintah.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan luasnya seluruh sasaran anggaran, dinyatakan dengan jelas dan spesifik yang tujuannya supaya dapat dipahami penanggung jawabnya atas anggaran tersebut. Terciptanya transparansi salah satunya dengan adanya angaran yang jelas, output yang jelas serta adanya keselarasan antara pengeluaran dan output yang dicapai menurut Khusaini, (Ronal, 2023). Masyarakat dengan mudah ikut serta mengawasi perangkat desa dalam pengelolaan dan desa karena adanya kejelasan tersebut.

Adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi bagaimana perangkat menganggarkan sesuai dengan tujuan yang dicapai instansi pemerintah. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana anggaran dalam melaksanakan pekerjaanya, sehingga hal ini tidak memotivasi pelaksana anggaran untuk mencapai hasil yang diharapkan (Estrilia et al., 2023).

Transparansi

Menurut Mardiasmo (Fajri et al., 2021) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan informasi. Artinya masyarakat berhak tahu mengenai aktivitas dana desa yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat tersebut. Adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses terhadap proses penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu perwujudan transparansi. Tanpa adanya keterbukaan dan perlibatan publik sebagai suatu jejaring dalam pengambilan keputusan pengambilan kebijakan di daerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korupsi dan lemah dari sisi akuntabilitas (Aprilya dan Fitria, 2020). Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pengelolaan dana desa dan semakin mudah mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Syamsi, (Dewi dan Erlinawati, 2020) Partisipasi masyarakat adalah suatu proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Tidak hanya melibatkan masyarkat dalam pengambilan keputusan tapi melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan maka semakin tinggi rasa tanggung jawab aparatur pengelola dana desa untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan, maka pembangunan akan menjadi lebih baik

kedepannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula menurut Medianti, (Fajri et al., 2021).

Kerangka Pikir Penelitian

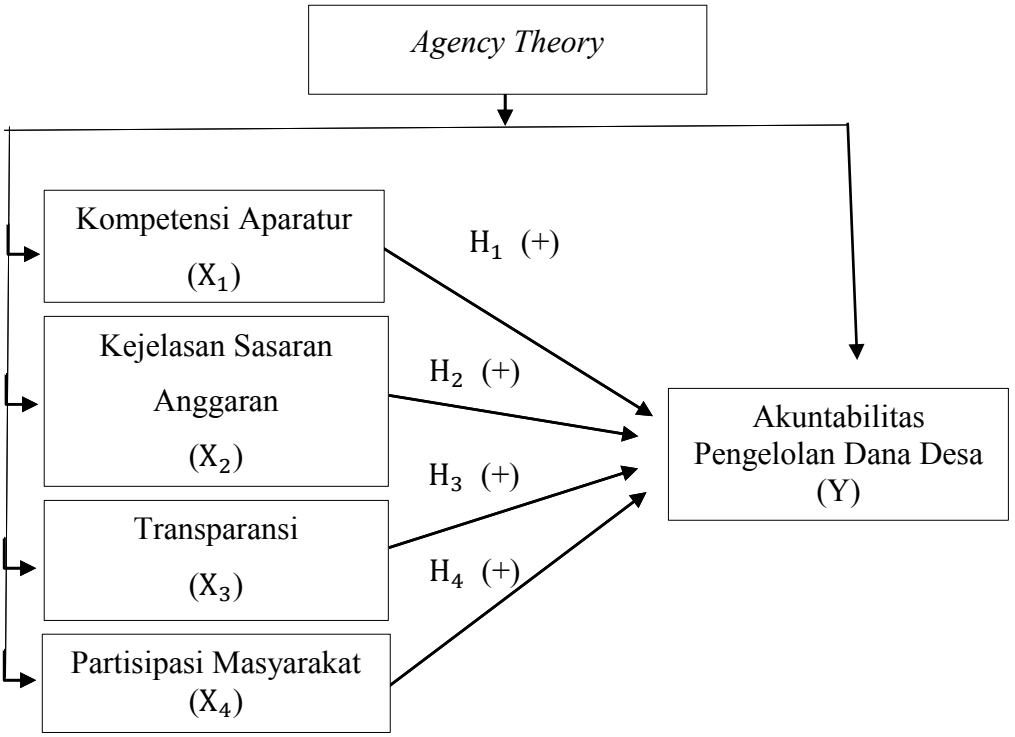

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi Aparatur merupakan suatu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di pemerintahan sebagai aparatur desa. Keberhasilan suatu pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi dilandasi dengan seberapa tinggi kualitas sumber daya manusia yang menjalankan. Sumber daya manusia yang berkualitas didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, serta keterampilan yang dimilikinya, serta memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Hal ini terbukti dalam penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Alauddin (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusnia (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H_1: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan luasnya seluruh sasaran anggaran yang tersusun, dinyatakan dengan jelas dan spesifik yang tujuannya supaya dapat dipahami penanggung jawabnya atas anggaran tersebut sehigga akuntabilitas dapat terlaksana. Mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah terlaksana dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan akan lebih mudah dengan adanya kejelasan sasaran anggaran. Hal tersebut didukung oleh penelitian Yuliastuti dan Riharjo (2020) dan Dwipayani dan Hutnaleontina (2022) yang mengatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H_2: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan, menyajikan, dan melaporkan secara transparan. Adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses terhadap proses penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu perwujudan transparansi. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pengelolaan dana desa dan semakin mudah mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri et al., (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H_3: Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisispasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat adalah ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan masyarkat dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat akan menghasilkan rasa tanggung jawab aparatur pengelola dana desa untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan, maka pembangunan akan menjadi lebih baik kedepannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Erlinawati (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil serupa dengan penelitian Sujatnika dan Sulindawati (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H_4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur, kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, dikarenakan jumlah populasi yang relative kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yakni 33 responden.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuisioner yang akan dibagikan kepada responden, yakni perangkat, kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuisioner penelitian ini adalah skala likert 1-5 yakni dengan memberikan skor 5 sebagai nilai tertinggi dan skor 1 sebagai nilai terendah. Uji penelitian ini menggunakan SPSS 25 dan uji yang dilakukan antara

lain uji validitas, uji realiablititas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji F, uji t dan koefisien determinasi (R^2)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen: Variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebuah pertanggungjawaban dari pengelola dana desa kepada masyarakat atas kinerjanya, sejauh mana merealisasikan kebijakan yang dijalankan dalam upaya memenuhi harapan masyarakat. disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kinerja aparatur pemerintah desa di mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Kusnia (2022), yaitu: Kejujuran dan keterbukaan informasi, Kepatuhan dalam pelaporan, Kesesuaian prosedur, Ketepatan penyampaian laporan.

Variabel Independen: Variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen disebut dengan variabel indenpenden. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen, yaitu Kompetensi Aparatur, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat.

Kompetensi Aparatur (X1)

Kompetensi aparatur merupakan suatu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di pemerintahan sebagai aparatur desa. Semakin tinggi latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, serta keterampilan yang dimiliki aparatur desa maka semakin baik juga kompetensi sumber daya manusia tersebut. Melalui kompetensi aparatur desa dapat memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Indikator kompetensi aparatur menurut Kusnia (2022), yaitu: Pengetahuan, Kemampuan, Keahlian teknis, Sikap atau perilaku, Inisiatif dalam bekerja.

Kejelasan Sasaran anggaran (X2)

Kejelasan sasaran anggaran merupakan luasnya seluruh sasaran anggaran yang tersusun, dinyatakan dengan jelas dan spesifik yang tujuannya supaya dapat dipahami penanggung jawabnya atas anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap aparatur untuk menyusun anggaran sesuai dengan rencana yang ingin dicapai pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja. Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur oleh indikator yang dikembangkan oleh Yuliastuti dan Riharjo (2020), yaitu: Tujuan, Kinerja, Standart, Sasaran prioritas

Transparansi (X3)

Transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan, menyajikan, dan melaporkan secara transparan. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Semakin transparan aparatur desa kepada masyarakat semakin menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada aparat, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel dengan adanya rasa kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Indikator transparansi menurut Fajri et al., (2021), yaitu: Adanya musyawarah yang melibatkan Masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan, Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi Masyarakat (X4)

Partisipasi masyarakat adalah ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan masyarkat dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat akan menghasilkan rasa tanggung jawab aparatur pengelola dana desa untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan, maka pembangunan akan menjadi lebih baik kedepannya. Pembangunan yang semakin baik berasal dari pengelolaan dana yang baik pula. Indikator transparansi menurut Alauddin (2020), yaitu: Keterlibatan

dalam pengambilan keputusan program-program desa, Mengusulkan rencana anggaran, Terlibat dalam rapat paripurna, Terlibat mengawasi dan melaporkan, Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, Memberikan penghargaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai terendah dari jawaban responden untuk variabel kompetensi aparatur adalah 24 dan nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 33, sehingga rata-rata total jawaban responden pada variabel kompetensi aparatur adalah 28,12 dengan standar deviasi 1,963. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup mengerti dan memahami tentang pentingnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Devisiasi
Kompetensi Aparatur	32	24	33	28,12	1,963
Kejelasan Sasaran Anggaran	32	16	23	19,22	2,106
Transparansi	32	17	25	21,41	2,183
Partisipasi Masyarakat	32	18	28	22,88	2,721
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	32	17	25	21,41	1,998

Sumber: Output SPSS 25 data diolah, 2024

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan total skor sehingga didapat nilai *pearson correlation*. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabeL. Dari data penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara r hitung dengan r tabel menghasilkan semua r hitung lebih besar dari r tabel yaitu dengan hasil r tabel senilai 0,3494. Disimpulkan setiap pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid, sehingga mampu mengukur setiap instrument kuisioner yang diukur.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur jawaban responden dari pernyataan dalam kuesioner dengan melihat tingkat konsistensi jawaban responden, dan juga

untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *Cronbach Alpha* (α). Kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2021:61), yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* > 0,70. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach Alpha* < 0,70 maka pernyataan variabel dinyatakan tidak andal. Dari data penelitian, terlihat semua variable reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87228170
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.084
	Negative	-.099
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Output IBM SPSS 25 (diolah, 2024)

Tabel 3. menunjukkan bahwa hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200 hasil ini lebih dari taraf signifikansi 0,05. Artinya data yang diambil berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Pengukuran menggunakan metode Glajser memberikan hasil bahwa keempat variabel bebas yaitu kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dari hasil

ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.801	4.095		-.440	.664
	Kompetensi	.202	.128	.344	1.576	.127
	Kejelasan	-.035	.112	-.063	-.310	.759
	Transparansi	-.169	.104	-.320	-1.622	.116
	Partisipasi	.081	.085	.191	.951	.350

a. Dependent Variable: ABSRes

Sumber: Output IBM SPSS 25 (diolah, 2024)

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi	.674	1.483
	Kejelasan	.769	1.300
	Transparansi	.824	1.214
	Partisipasi	.792	1.262

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Tabel 5. menunjukkan bahwa nilai output VIF untuk kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki nilai kurang dari 10.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Menurut Ghozali (2021:146) pengujian regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur,

kejelasan sasaran anggaran, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 6. Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-8.812	6.434		-1.370	.182
	Kompetensi	.517	.224	.401	2.308	.029
	Kejelasan	.346	.201	.285	1.723	.096
	Transparansi	.137	.188	.116	.725	.475
	Partisipasi	.266	.148	.277	1.793	.084

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

$$Y = - 8{,}812 + 0{,}517X1 + 0{,}346X2 + 0{,}137X3 + 0{,}266X4 + e$$

Interpretasi dari persamaan diatas yaitu :

α = - 8,812 Konstanta sebesar - 8,812 adalah titik potong garis regresi dengan sumbu tegak.

Koefisien regresi $\beta 1 = 0{,}517$. Koefesien regresi dari kompetensi aparatur (X1) bernilai positif sebesar 0,517 artinya semakin tinggi kompetensi aparatur maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) atau sebaliknya, variabel kompetensi aparatur (X1) mengalami kenaikan 1 skor maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,517.

Koefesien regresi dari peran kejelasan sasaran anggaran (X2) $\beta 2 = 0{,}346$. bernilai positif sebesar 0,346 artinya semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) atau sebaliknya, variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) mengalami kenaikan 1 skor maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,346.

Koefesien regresi dari transparansi (X3) $\beta 3 = 0{,}137$ bernilai positif sebesar 0,137 artinya semakin tinggi transparansi maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) atau sebaliknya, variabel transparansi (X3) mengalami

kenaikan 1 skor maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,137.

Koefisien Partisipasi (X4) β4 = 0,266. Koefesien regresi dari partisipasi masyarakat (X4) bernilai positif sebesar 0,266 artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) atau sebaliknya, variabel partisipasi masyarakat (X4) mengalami kenaikan 1 skor maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,266.

Uji F

Hasil Uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} 6,327. untuk taraf signifikan 0,05 dan df= 4 serta dengan df yang diperoleh dari perhitungan n-k-1= 32-4-1= 27 maka F_{tabel} = 2,727 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwasannya kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 7. Uji F (Simultan)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.332	4	27.583	6.327	.001[b]
	Residual	117.709	27	4.360		
	Total	228.041	31			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Kejelasan, Transparansi, Kompetensi

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2024)

Uji t

Berdasarkan tabel uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,308 lebih besar dari t tabel 1,703 dan memiliki nilai signifikansi 0,029 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-8.812	6.434		-1.370	.182
	Kompetensi	.517	.224	.401	2.308	.029
	Kejelasan	.346	.201	.285	1.723	.096
	Transparansi	.137	.188	.116	.725	.475
	Partisipasi	.266	.148	.277	1.793	.084

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Output IBM SPSS 26 (diolah, 2024)

Kompetensi yang dimiliki aparatur dapat mendorong pemahaman tentang tata cara pengelolaan dana desa mulai dari menyusun pelaporan terkait penganggaran, penggunaan dan pertanggung jawaban. Tidak memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan benar akan berdampak kekeliruan penyusunan laporan keuangan sehingga pelaporan yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Keberhasilan suatu pelaksanaan tugas dilandasi dengan seberapa tinggi kualitas sumber daya manusia yang menjalankan, sehingga semakin berkualitas sumber daya manusia yang menjalankan tentunya pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hasil penelitian ini didukung dan sejalan dengan penelitian Alauddin (2020), Kusnia (2022), dan Atiningsih (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1,723 lebih besar dari t tabel 1,703 dan memiliki nilai signifikansi 0,096 > 0,05 maka Ho diterima dan H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada ketentuan yang jelas mengenai tujuan dan penggunaan dana desa, yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintahan desa untuk mengelola dana dengan efektif. Implementasinya meskipun sasaran anggaran telah ditetapkan dengan jelas, adanya perubahan kebijakan yang tidak

terduga dapat menyebabkan pergeseran dalam alokasi dana yang mengharuskan pemerintah desa menyesuaikan penggunaan dana dan kebutuhan yang muncul secara mendadak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti dan Riharjo (2020) memperoleh hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto dan Sumadi (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 0,725 lebih kecil dari t tabel 1,703 dan memiliki nilai signifikansi 0,475 > 0,05 maka Ho diterima dan H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya yang menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan dana desa karena mencerminkan keterbukaan dan integritas dalam menggunakan anggaran publik. Hanya dengan transparansi saja belum cukup untuk menjamin akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi tidak selalu menjamin bahwa warga atau pihak terkait dapat memahami dan mengawasi dengan efektif penggunaan dana tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri et al., (2021) memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilya dan Fitria (2020) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1,793 lebih besar dari t tabel 1,703 dan memiliki nilai signifikansi 0,084 > 0,05 maka Ho diterima dan H4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hasil

penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses ketika unsur masyarakat mengambil pengaruh dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam upaya mereka untuk aktif telibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilya dan Fitria (2020), Indraswari dan Rahayu (2021), dan Dwipayani dan Hutnaleontina (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Uji Determinasi (R^2)

Hasil uji determinasi menggunakan nilai *adjusted R square* dan menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan nilai 0,407 atau sebesar 40,7% sedangkan sisanya 59,3% kemungkinan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi ($Adjusted\ R^2$)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696[a]	.484	.407	2.08796

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Kejelasan, Transparansi, Kompetensi

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah bagi Instansi pemerintahan khususnya desa-desa yang ada dibanyuwangi dari penelitian ini digunakan pandangan mengenai pengaruh kompetensi aparatur, kejelasan sasarn anggaran, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dari penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi pemerintahan desa untuk kebijakan yang dilakukan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alauddin, F. C. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *3*(April), 49–58.

Anggraeni, N. P. D., Sumadi, N. K., & Andayani W, R. D. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 386–405.

Aprilya, K. R., & Fitria A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(3), 1–20.

Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*, 709.

Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, *10*(1), 2015–2019.

Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se- Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 273–298.

Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(1), 28–47.

Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *(BPJP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, *20*(01), 1–11.

Fajri, R., Agustii, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, *17*(2), 209.

Ghozali, H, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 26*. Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana DesaDi Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, *1*(3), 480–492.

Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(2), 36–48.

Khusnia, A. (2022). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*

Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, *2*(2), 162.

Pebriyanto, I. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Kompetensi Aparatur Desa,Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(4), 372–381.

Ridho, Rasyid, and Teuku Muhammad Valdy Arief. 2023. "Diduga Korupsi Dana Desa Rp 900 Juta Untuk Beli 'Skincare', Kades Di Banten Segera Diadili." Kompas.Com. 2023. https://regional.kompas.com/read/2023/07/21/064949778/diduga-korupsi-dana-desa-rp-900-juta-untuk-beli-skincare-kades-dibanten?page=all. (diakses pada 13 November 2023)

Ronal, M. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), 709.

Roshida, H. (2019). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada*

Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal). *Nucl. Phys.*, *13*(1), 104–116.

Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, PemanfaatanTeknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi TerhadapAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *4*(4), 330–342.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *13*(2019), 378–388.

Sutrepti, N. L. P. A., Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(2), 25–35.

Yuliastuti, E. R., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh kompetensi petugas, pegendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(10).